



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan testrukturnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi acuan layanan kepada pelaku usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pasal 2

Standar Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

Prinsip dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan memperhatikan:

- a. sederhana merupakan standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas;
- b. partisipatif merupakan penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dari mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. akuntabel merupakan hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan merupakan standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan;

- e. transparansi merupakan standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan merupakan standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana;

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi ruang lingkup pelayanan :
 - a. Perizinan yang dilayani melalui sistem Online Single Submission (OSS):
 - 1. Sektor kelautan perikanan
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Surat Izin Usaha Perikanan;
 - 3) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
 - 2. Sektor pertanian
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Izin Praktek Dokter Hewan;
 - 3) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk warg negara asing);
 - 4) Pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - 5) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk warga negara Indonesia);
 - 6) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner);
 - 7) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).
 - 3. Lingkungan hidup dan kehutanan
 - 1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Izin Lingkungan;
 - 3) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
 - 4) Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - 4. Sektor perindustrian
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Izin Usaha Industri (IUI).

5. Sektor perdagangan
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Izin Usaha Perdagangan;
 - 3) Tanda Daftar Gudang; dan
 - 4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri.
6. Sektor transportasi
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Izin Usaha Angkutan;
 - 3) Izin Trayek;
7. Sektor kesehatan
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Izin Apotik ;
 - 3) Toko Obat;
 - 4) Izin Klinik;
 - 5) Izin Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 6) Izin rumah Sakit Swasta;
 - 7) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri;
 - 8) Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - 9) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
 - 10) Sertifikat Laik Sehat;
 - 11) Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga;
8. Sektor ketenagakerjaan
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) Izin Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. Standar Pelayanan Publik melalui sistem sicanik cloud; dan
 1. Sektor Pertanian
 - 1) Izin Tukang Potong Ternak (Verkonings); dan
 - 2) Izin Praktek Paramedik Veteriner.
 2. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan
 - 1) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 2) Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
 3. Sektor Kesehatan (sicanik)
 - 1) Permohonan Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);
 - 2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 - 3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
 - 4) Surat Izin Praktek Perawat Anestesi (SIPPA);
 - 5) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
 - 6) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 - 7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 - 8) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz);
 - 9) Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
 - 10) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 - 11) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO);
 - 12) Surat Izin Praktek Elektromedik (SIP-E);
 - 13) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 - 14) Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);
 - 15) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
 - 16) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
 - 17) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
 - 18) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
 - 19) Surat Izin Optical (SIO);
 - 20) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);

- 21) Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik;
- 22) Surat Izin Laboratorium Swasta;
- 23) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
- 24) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT);
- 25) Surat Izin Apotik (SIA).
- 4. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Izin Operasional SMP Swasta;
 - 2) Izin Operasional SD Swasta;
 - 3) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 4) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 5) Izin Operasional Kursus.
- 5. Sektor Periklanan
 - 1) Izin Reklame.
- c. Standar Pelayanan Publik melalui aplikasi teknis terintegrasi/Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
 - 1. Sektor Pekerjaan umum dan perumahan real eastat
 - 1) Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - 2) Izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - (2) Standar Pelayanan Publik melalui sistem online single submission sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Standar Pelayanan Publik melalui sistem sicanik cloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Standar Pelayanan Publik melalui aplikasi teknis terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Pasaman Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekretaris Daerah		
Kepala DPMPTSP		

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS):

1. SEKTOR KELAUTAN PERIKANAN

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
1.	Urusan/Sektor Kelautan dan Perikanan			
	A.	Rendah		
	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

	Olahan dan Ikan Olahan		
47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
B.	Menengah Rendah		
03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan
03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan
50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan
03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03251	Pembesaran	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha

	Pisces/Ikan Bersirip Air Payau		menjalankan kegiatan usaha
03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03212	Pembenihan Ikan Laut	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03252	Pembenihan Ikan Air Payau	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10211	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangn Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10213	Industri Pembekuan Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10214	Industri Pemindangan Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10217	Industri Pendinginan/ Pengemasan Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

	Udang dalam Kaleng		
10291	Industri Penggaraman / Pengerangan Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10297	Industri Pendinginan / Pengemasan Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10414	Industri Minyak Ikan	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10779	Industri Produk Masak Lainnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
C.	Menengah Tinggi		
03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03212	Pembenihan Ikan Laut	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
03252	Pembenihan Ikan Air Payau	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
D.	Tinggi		

03121	Penangkapan <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip di Perairan Darat	7 Hari	1 Tahun
03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	7 Hari	1 Tahun
03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	7 Hari	1 Tahun
03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	7 Hari	1 Tahun
03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	7 Hari	1 Tahun
03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	7 Hari	1 Tahun
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	7 Hari	1 Tahun
50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	7 Hari	1 Tahun

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU) KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan
- 2) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR KELAUTAN PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam. 4. PP Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. 5. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

		<p>Nomor 14 tahun 2007 tentang keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Ketersediaan ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 tahun 2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09 tahun 2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penyebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2010 tentang Minapolitan. 11. Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan. 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (<i>Anguilla</i> spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara RI. 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat. 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau dan Perikanan Budidaya Laut. 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 tahun 2014 tentang Larangan pengeluaran ikan hias anak ikan arwana, benih ikan botia hidup, dan ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun 2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik. 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2014 tentang Jenis ikan Baru yang akan dibudidayakan. 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 tahun 2014 tentang Larangan pemasukan ikan jenis berbahaya dari luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
--	--	---

		<p>Nomor 43 tahun 2014 tentang Larangan pemasukan udang kena wabah.</p> <p>22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p> <p>23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang pemberian Izin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 3 tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang Pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman umum Budidaya Ikan Hias Arwana Super Red (<i>Sceleropages Formosus</i>).</p> <p>26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2015 Tentang Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, dan Kontaminan Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi.</p> <p>27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan.</p> <p>28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik.</p> <p>29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih ikan dan/atau Inti Mutiara.</p> <p>30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan.</p> <p>31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pengadaan dan Peredaan Benih Ikan.</p> <p>32. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tata cara Pemasukan ikan Jenis/Varietas Baru ke Dalam Wilayah Negeri RI.</p> <p>33. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Ikan Lele sebagai Varietas Unggul.</p> <p>34. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikarlan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah</p>
--	--	---

		<p>Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.</p> <p>35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Ikan Patin Pasupati sebagai Varietas Unggul.</p> <p>36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Gesit sebagai Galur Unggul Induk Jantan.</p> <p>37. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Nirwana sebagai Varietas Unggul Induk Penjenis.</p> <p>38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Tkan yang Baik.</p> <p>39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencabutan Sumatera Selbagai KaWasan Karantina.</p> <p>40. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penetapan jenis-jenis penyakit ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan.</p> <p>41. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Monapolitan.</p> <p>42. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.</p> <p>43. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 66 tahun 2011 tentang Pelepasan Ikan Torsoso.</p> <p>44. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09 Tahun 2012 Pelepasan ikan Nila Srikandi.</p> <p>45. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelepasan Ikan Nila Nirwana.</p> <p>46. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelepasan Ikan Nila Sultana.</p> <p>47. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2012 Pelepasan ikan Nila Anjani.</p> <p>48. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2012 Pelepasan Ikan Nila Merah Nilasa.</p> <p>49. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelepasan Nila Jantan Pandu dan Betina Kunti.</p> <p>50. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penetapan kawasan Minapolitan.</p>
--	--	--

		<p>51. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan.</p> <p>52. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pelepasan Varietas Udang Vanamei sebagai Varietas Unggul.</p> <p>53. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pelepasan Varietas Udang Galah sebagai Varietas Unggul.</p> <p>54. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09 tahun 2002 tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan.</p> <p>55. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2004 tentang pedoman umum pembudidayaan udang di tambak.</p> <p>56. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2006 tentang pelepasan lobster Huna Capi Merah sebagai Varietas Unggul.</p> <p>57. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelepasan lobster Huna Capi Biru sebagai Varietas Unggul.</p>
2	Persyaratan	<p>Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK))</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; dan 3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB). <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office 2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS 5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem

		<p>OSS</p> <p>6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar</p> <p>Izin Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon meminta informasi di Front Office. 2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS. 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 4. DPMPISP bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem oss. 5. Kepala Dinas DPMPISP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Dokumen izin <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS. 2. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syaratkan. 3. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS. 4. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait. 5. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha PB UMKU
7	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online

		Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik. 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mampu mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00) 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30) 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin

2. SEKTOR PERTANIAN

1) Izin Praktek Dokter Hewan;

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
2	Urusan/Sektor Pertanian			
	A.	Rendah		
	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01111	Pertanian Jagung	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01112	Pertanian Gandum	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01113	Pertanian Kedelai	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01114	Pertanian Kacang Tanah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01115	Pertanian Kacang Hijau	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01121	Pertanian Padi Hibrida	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01122	Pertanian Padi Inbrida	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01132	Pertanian Hortikultura Buah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01136	Pertanian Jamur	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01193	Pertanian Tanaman Bunga	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01210	Pertanian Buah Anggur	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

	Sub Tropis		
01230	Pertanian Buah Jeruk	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01251	Pertanian Buah Beri	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01253	Pertanian Sayuran Tahunan	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01283	Pertanian Cabai	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01301	Pertanian Tanaman Hias	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01140	Perkebunan Tebu	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01150	Perkebunan Tembakau	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis .	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01261	Perkebunan Buah Kelapa	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01281	Perkebunan Lada	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01282	Perkebunan Cengkeh	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik / Penyegar, dan Obat Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
10421	Industri Kopra	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
22121	Industri Pengasapan Karet	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01630	Jasa Pasca Panen	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
10731	Industri Kakao	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
10761	Industri Pengolahan Kopi	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
10722	Industri Gula Merah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
20294	Industri Minyak Atsiri	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

01137	Pertanian Biji-bijian , Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01160	Pertanian Tanaman Berserat	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01269	Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01445	Produksi Bulu Domba	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01629	Jasa Penunjang	NA	Selama menjalankan kegiatan

	Peternakan Lainnya		usaha
10802	Industri Konsentrat Makanan Ternak	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
B.	Menengah Rendah		
01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01111	Pertanian Jagung	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01111	Pertanian Jagung	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01112	Pertanian Gandum	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01112	Pertanian Gandum	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01113	Pertanian Kedelai	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01113	Pertanian Kedelai	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01114	Pertanian Kacang Tanah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01114	Pertanian Kacang Tanah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01115	Pertanian Kacang Hijau	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01115	Pertanian Kacang Hijau	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01121	Pertanian Padi Hibrida	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01121	Pertanian Padi Hibrida	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01122	Pertanian Padi Inbrida	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01122	Pertanian Padi Inbrida	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

01132	Pertanian Hortikultura Buah	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01136	Pertanian Jamur	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01193	Pertanian Tanaman Bunga	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01194	Pembibitan Tanaman Bunga	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01210	Pertanian Buah Anggur	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01210	Pertanian Buah Anggur	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01230	Pertanian Buah Jeruk	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01230	Pertanian Buah Jeruk	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01251	Pertanian Buah Beri	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01251	Pertanian Buah Beri	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01253	Pertanian Sayuran Tahunan	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01259	Pertanian Buah	NA	Selama menjalankan kegiatan

	Semak Lainnya		usaha
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01283	Pertanian Cabai	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01301	Pertanian Tanaman Hias	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01445	Produksi Bulu Domba Mentah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01450	Peternakan Babi	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01468	Pembibitan Ayam Ras	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01492	Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
C.	Menengah Tinggi		
01111	Pertanian Jagung	3 hari	Selama menjalankan kegiatan

			usaha
01111	Pertanian Jagung	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01112	Pertanian Gandum	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01112	Pertanian Gandum	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01113	Pertanian Kedelai	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01113	Pertanian Kedelai	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01114	Pertanian Kacang Tanah	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01114	Pertanian Kacang Tanah	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01115	Pertanian Kacang Hijau	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01115	Pertanian Kacang Hijau	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01121	Pertanian Padi Hibrida	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01121	Pertanian Padi Hibrida	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01122	Pertanian Padi Inbrida	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01122	Pertanian Padi Inbrida	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01132	Pertanian Hortikultura Buah	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01136	Pertanian Jamur	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

01193	Pertanian Tanaman Bunga	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01210	Pertanian Buah Anggur	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01230	Pertanian Buah Jeruk	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01251	Pertanian Buah Beri	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01253	Pertanian Sayuran Tahunan	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01283	Pertanian Cabai	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01301	Pertanian Tanaman Hias	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01150	Perkebunan Tembakau	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01221	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis .	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01261	Perkebunan Buah Kelapa	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01281	Perkebunan Lada	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01282	Perkebunan	3 hari	Selama menjalankan kegiatan

	Cengkeh		usaha
01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik / Penyegar, dan Obat Lainnya	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01160	Pertanian Tanaman Berserat	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01269	Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01445	Produksi Bulu Domba Mentah	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01450	Peternakan Babi	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01622	Jasa Perkawinan Ternak	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01623	Jasa Penetasan Telur	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	15 hari	5 tahun
10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	15 hari	5 tahun
10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	15 hari	5 tahun
15111	Industri Pengawetan Kulit	15 hari	5 tahun
47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
D. Tinggi			
01140	Perkebunan Tebu	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
10721	Industri Gula Pasir	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
10763	Industri Pengolahan Teh	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01450	Peternakan Babi	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01468	Pembibitan Ayam Ras	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
01623	Jasa Penetasan Telur	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) SEKTOR PERTANIAN

- 1) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk warg negara asing)
- 2) Pelayanan jasa laboratorium veteriner
- 3) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk warga negara Indonesia)
- 4) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)
- 5) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan

		<p>Berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman 6. PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 7. PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan Gizi Pangan 8. PP Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan 9. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Sistim Informasi LB2B 10. Permentan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium 11. Permentan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Pangan Berkelanjutan 12. Perermentan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Pangan Berkelanjutan 13. PP No 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 14. Permentan No 31 tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam pedaging dan Petelur 15. Permentan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging dan Itik Petelur 16. Pementan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh yang Baik 17. Permentan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya kelinci yang Baik 18. Permentan No 64 tahun 2014 tentang Budidaya Kambing Perah 19. Permentan No 79 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal yang Baik 20. Permentan No 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik 21. Permentan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik 22. Permentan No 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kmbing dan Domba 23. Permentan Nomor 17 Tahun 2018 tentang PSAT <p>Permentan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jasa Medik Veterine</p>
2	Persyaratan	<p>Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>(KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK)</p>
3	Sistem,	Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohonan meminta informasi di Front Office2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; dan3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohonan meminta informasi di Front Office2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar <p>Izin Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohonan meminta informasi di Front Office;2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS;3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;4. DPMPISP bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem oss;5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS;6. Pemohon Menerima Dokumen izin. <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS;2. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syaratkan;3. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS;4. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait;5. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak
------------------------	---

		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha
7	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00) 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30) 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin

3. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku	
	Kode KBLI	Judul KBLI			
3	Urusan/Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
	A.	Rendah			
	B.	Menengah Rendah			
	C.	Menengah Tinggi			
	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; danPemeriksaan teknis 1 tahun. 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	
	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	1.	Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun
			2.	Pemeriksaan teknis 1 tahun.	
	37021	Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1.	Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun
			2.	Pemeriksaan teknis 1 tahun.	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	5 Hari	5 Tahun	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	10 Hari	5 Tahun	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	10 Hari	5 Tahun	
	D.	Tinggi			
	37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	1.	Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; danPemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun
			2.	Pemeriksaan teknis 1 tahun.	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	20 Tahun	

	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	20 Tahun
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	20 Tahun
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	20 Tahun
	02209	Usaha kehutanan lainnya	30 Hari	35 Tahun

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 3. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 5. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 /MenLHK/Setjen/Kum.1/3 tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK/Setjen/Kum.1/4 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam 9. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.13/MenLHK/Setjen/Kum. 1/5 tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Pemanaman Modal 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 terntang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

		<p>Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>
2	Persyaratan	<p>Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>(KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK)</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; 3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB). <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office 2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS 5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS 6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar <p>Izin Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office. 2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS. 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

		<p>Satu Pintu bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem oss;</p> <p>5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS;</p> <p>6. Pemohon Menerima Dokumen izin.</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)</p> <p>1. Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS.</p> <p>2. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syaratkan.</p> <p>3. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS.</p> <p>4. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait.</p> <p>5. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha
7	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik;</p> <p>2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3. Mampu mengoperasikan Komputer.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan</p> <p>2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal.</p>
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<p>1. Kotak saran dan pengaduan;</p> <p>2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com;</p> <p>3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121;</p> <p>4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638 ;</p> <p>5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan</p>

		Online.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00) ; 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30) ; dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

4. SEKTOR PERINDUSTRIAN

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Izin Usaha Industri (IUI);

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
4	Urusan/Sektor Perindustrian			
	A.	Rendah		
	10211	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10214	Industri Pemindangan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10291	Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10295	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

	Sayuran		usaha
10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10391	Industri Tempe Kedelai	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10392	Industri Tahu Kedelai	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10421	Industri Kopra	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10531	Industri Pengolahan Es Krim	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

	Es Balok)		
10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10615	Industri Makanan Sereal	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10621	Industri Pati Ubi Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10629	Industri Pati Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10634	Industri Pati Beras dan Jagung	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10710	Industri Produk Roti dan Kue	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10722	Industri Gula Merah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10734	Industri Kembang Gula	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10739	Industri Kembang Gula Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10761	Industri Pengolahan Kopi	NA	Selama Pelaku Usaha

			menjalankan kegiatan usaha
10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10763	Industri Pengolahan The	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10774	Industri Pengolahan Garam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10779	Industri Produk Masak Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10792	Industri Kue Basah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10795	Industri Krimer Nabati	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10796	Industri Dodol	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10799	Industri Produk Makanan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10801	Industri Ransum Makanan Hewan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11040	Industri Minuman Ringan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11090	Industri Minuman Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13134	Industri Batik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

			usaha
13926	Industri Karung Bukan Goni	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13941	Industri Tali	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13942	Industri Barang dari Tali	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13995	Industri Kapuk	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16101	Industri Penggergajian Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16102	Industri Pengawetan Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16104	Industri Pengolahan Rotan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16211	Industri Kayu Lapis	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16213	Industri Panel Kayu Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16214	Industri Veneer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16222	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16230	Industri Wadah dari Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16291	Industri Barang Anyaman	NA	Selama Pelaku Usaha

	dari Rotan dan Bambu		menjalankan kegiatan usaha
16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18111	Industri Pencetakan Umum	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
19292	Industri Briket Batu Bara	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hafa Makro Primer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20294	Industri Minyak Atsiri	NA	Selama Pelaku Usaha

			menjalankan kegiatan usaha
21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21022	Industri Produk Obat Tradisional	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22121	Industri Pengasapan Karet	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22122	Industri Remilling Karet	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22199	Industri Barang dari Karet Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22299	Industri Barang Plastik Lainnya Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23123	Industri Kemasan dari Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23942	Industri Kapur	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23943	Industri Gips	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23951	Industri Barang dari Semen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23952	Industri Barang dari Kapur	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

			usaha
24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertukangan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25934	Industri Peralatan Umum	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25951	Industri Barang dari Kawat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25952	Industri Paku, Mur dan Baut	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25999	Industri Barang Logam Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha

			menjalankan kegiatan usaha
26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26391	Industri Kartu Cerdas(Smart Card)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27202	Industri Akumulator Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27330	Industri Perlengkapan Kabel	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28192	Industri Mesin Timbangan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28193	Industri Mesin Pendingin	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28230	Industri Mesin Metalurgi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28291	Industri Mesin Percetakan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

			usaha
30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30990	Industri Alat Angkutan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
31001	Industri Furnitur dari Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
31003	Industri Furnitur dari Plastik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
31004	Industri Furnitur dari Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
31009	Industri Furnitur Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32201	Industri Alat Musik Tradisional	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32903	Industri Kerajinan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32905	Industri Serat Sabut Kelapa	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32909	Industri Pengolahan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33190	Reparasi Peralatan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33200	Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
35302	Produksi Es	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
38212	Produksi Kompos Sampah Organik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal dengan Mobilitas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
61929	Jasa Multimedia Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things (IoT)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
63111	Aktivitas Pengolahan Data	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
72102	Penelitian dan Pengembangan teknologi dan rekayasa	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan alam dan teknologi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95210	Reparasi Alat-alat elektronik Konsumen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95230	Reparasi Alas kaki dan barang dan kulit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95240	Reparasi Furnitur dan perlengkapan rumah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95299	Reparasi Barang rumah tangga dan pribadi lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
B.	Menengah Rendah		
10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10213	Industri Pembekuan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10217	Industri Pendinginan/ Pengerasan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10414	Industri Minyak Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10771	Industri Kecap	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	NA	Selama Pelaku Usaha

			menjalankan kegiatan usaha
13112	Industri Pemintalan Benang	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13911	Industri Kain Raj u tan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13912	Industri Kain Sulaman/Bordir	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13925	Industri Karung Goni	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13930	Industri Karpets dan Permadani	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman / Bordir	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15202	Industri Sepatu Olahraga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15209	Industri Alas Kaki Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16215	Industri Kayu Laminasi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan dan Gabus,	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17012	Industri Kertas Budaya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17019	Industri Kertas Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17091	Industri Kertas Tissue	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18113	Industri Pencetakan 3D Printing	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
19100	Industri Produk dari Batu Bara	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20125	Industri Pupuk Hara Makro	NA	Selama Pelaku Usaha

	Sekunder		menjalankan kegiatan usaha
20126	Industri Pupuk Hara Mikro	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20127	Industri Pupuk Pelengkap	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20128	Industri Media Tanam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20129	Industri Pupuk Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20223	Industri Lak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20234	Industri Perekat Gigi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20291	Industri Perekat/Lem	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20293	Industri Tinta	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20295	Industri Korek Api	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

20299	Industri Barang Kimia Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21013	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22112	Industri Vulkanisir Ban	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24320	Industri Pengecoran Logam	NA	Selama Pelaku Usaha

	Bukan Besi dan Baja		menjalankan kegiatan usaha
25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25994	Industri Pembuatan Profil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26220	Industri Perlengkapan Komputer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27111	Industri Motor Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27404	Industri Lampu Led	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28112	Industri Motor Pembakaran	NA	Selama Pelaku Usaha

	Dalam		menjalankan kegiatan usaha
28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28230	Industri Mesin Metalurgi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28263	Industri Mesin Tekstil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30111	Industri Kapal dan Perahu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32111	Industri Permata	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32115	Industri Perhiasan Mutiara	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32300	Industri Alat Olahraga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32401	Industri Alat Permainan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32402	Industri Mainan Anak-Anak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi,	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

	Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic		usaha
32503	Industri Kaca Mata	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32902	Industri Pita Mesin Tulis/ Gamba	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33133	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
37021	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
37022	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45201	Reparasi Mobil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
C.	Menengah Tinggi		
10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10520	Industri Pengolahan Susu	7 hari	Selama Pelaku Usaha

	Bubuk dan Susu Rental		menjalankan kegiatan usaha
10723	Industri Sirop	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11052	Industri Air Minum Isi Ulang	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13122	Industri Kain Tenun Ikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13131	Industri Penyempurnaan Benang	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13132	Industri Penyempurnaan Kain	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13133	Industri Pencetakan Kain	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13999	Industri Tekstil Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15111	Industri Pengawetan Kulit	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15112	Industri Penyamakan Kulit	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	7 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20292	Industri Bahan Peledak	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22291	Industri Barang Plastik Lembaran	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23111	Industri Kaca Lembaran	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23112	Industri Kaca Pengaman	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23119	Industri Kaca Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23941	Industri Semen	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

	Bangunan		usaha
25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25995	Industri Lampu dari Logam	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel(Wireless)	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26710	Industri Peralatan Fotografi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	7 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	7 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27310	Industri Kabel Serat Optik	7 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28174	Industri Mesin Fotokopi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

			usaha
30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33153	Reparasi Pesawat Terbang	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
63112	Aktivitas Hosting	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
74100	Aktivitas Perancangan Khusus	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
77391	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usahat tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
D.	Tinggi		
10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10412	Industri Margarin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10616	Industri Tepung Terigu	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10623	Industri Glukosa dan sejenisnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10635	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10721	Industri Gula Pasir	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10731	Industri Kakao	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan

			usaha
10791	Industri Makanan Bayi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11032	Industri Malt	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11051	Industri Air Kemasan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12012	Industri Rokok Putih	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12019	Industri Rokok Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13991	Industri Kain Pita	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13993	Industri Nonwoven	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13994	Industri Kain Ban	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18112	Industri Pencetakan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20132	Industri Karet Buatan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20302	Industri Serat Stapel Buatan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24101	Industri Besi dan Baja Dasar	7 hari	Selama Pelaku Usaha

	(Iron And Steel Making)		menjalankan kegiatan usaha
24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25200	Industri Senjata dan Amunisi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30400	Industri Kendaraan Perang	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32906	Industri Produksi Radioisotop	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33112	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
41013	Konstruksi Gedung Industri	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
68130	Kawasan Industri	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71201	Jasa Sertifikasi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71202	Jasa Pengujian Laboratorium	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71203	Jasa Inspeksi Periodik	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71205	Jasa Kalibrasi/ Metrologi	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71206	Jasa Commissioning Proses Industrial Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC).	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

	74909	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	77301	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usahat tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	82920	Aktivitas Pengepakan	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri 3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Izin Kawasan Industri 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha dan atau produk pada Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko sektor perindustrian
2	Persyaratan	Berdasarkan dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; dan 3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB). Sertifikat Standar : 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS; 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di

		<p>kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;</p> <p>4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS;</p> <p>5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS;</p> <p>6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar.</p> <p>Izin Usaha :</p> <p>1. Pemohonan meminta informasi di Front Office;</p> <p>2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS;</p> <p>3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;</p> <p>4. DPMPTSP bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem oss;</p> <p>5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS.</p> <p>6. Pemohon Menerima Dokumen izin.</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)</p> <p>Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS;</p> <p>1. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syatkan;</p> <p>2. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS;</p> <p>3. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait; dan</p> <p>4. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Berdasarkan dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha
7	Sarana, Prasarana atau	Ruang Tunggu Tempat Parkir

	Fasilitas	Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksanaan	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan Komputer.
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin

5. SEKTOR PERDAGANGAN

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
5	Urusan/Sektor Perdagangan			
	A.	Rendah		
	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45202	Pencucian dan Salon Mobil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45406	Perdagangan Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup non dilindungi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46311	Perdagangan Besar Beras	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46313	Perdagangan Besar Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

46332	Perdagangan Besar Produk Roti	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46411	Perdagangan Besar Tekstil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46412	Perdagangan Besar Pakaian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gam bar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46493	Perdagangan Besar Alat Musik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46495	Perdagangan Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive , Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomuni- kasi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapan -nya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), , Suku Cadang dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46632	Perdagangan Perdagangan Besar Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46637	Perdagangan Besar Cat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47213	Perdagangan Eceran Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47241	Perdagangan Eceran Beras	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47420	Perdagangan Eceran Khusus Perlatan Audio dan Video di Toko	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47511	Perdagangan Eceran Tekstil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47521	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47522	Perdagangan Eceran Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47528	Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47591	Perdagangan Eceran Furnitur	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47711	Perdagangan Eceran Pakaian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47713	Perdagangan Eceran Perlengkap Pakaian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47734	Perdagangan Eceran Jam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Bermotor	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Perlengkap Pakaian Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47783	Perdagangan Eceran Barang dan Kerajinan dari Logam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47784	Perdagangan Eceran Barang dan Kerajinan dari Keramik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47785	Perdagangan Eceran Lukisan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47796	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47797	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Kehutanan dan Perburuan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah, dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Elektronik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47911	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47912	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47913	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47914	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47919	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Mac am Barang Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Komestik dan Alat Laboratorium	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan. Mainan Anak-Anak dan Lukisan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
52101	Pergudangan dan Penyimpanan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
52102	Aktivitas Cold Storage	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Departmen Store)	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
B.	Menengah Rendah		
C.	Menengah Tinggi		
D.	Tinggi		
47221	Perdagangan Eceran	5 Hari	3 Tahun

- SEKTOR PERDAGANGAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)**
 - Tanda Daftar Gudang; dan
 - Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERDAGANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<div>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perdagangan</div> <div>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang</div> <div>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sesuai Elektronik Di Bidang Perdagangan</div> <div>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam perdagangan Sistim Elektronik</div> <div>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan.</div>
2	Persyaratan	<div>Berdasarkan dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</div> <div>(KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK)</div>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div>Nomor Induk Berusaha (NIB) :</div> <div>1. Pemohonan meminta informasi di Front Office;</div> <div>2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; dan</div> <div>3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB).</div> <div>Sertifikat Standar :</div> <div>1. Pemohonan meminta informasi di Front Office;</div> <div>2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS;</div> <div>3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;</div> <div>4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS;</div> <div>5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan</div> <div>6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar.</div> <div>Izin Usaha :</div>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS; 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan; 4. DPMPISP bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem oss; 5. Kepala Dinas DPMPISP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan 6. Pemohon Menerima Dokumen izin. <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS. 2. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syaratkan. 3. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS. 4. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait. 5. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Berdasarkan dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha
7	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

		3. Mampu mengoperasikan Komputer.
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal.
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

6. SEKTOR TRANSPORTASI

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Izin Usaha Angkutan;
- 3) Izin Trayek;

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
6	Urusan/Sektor Transportasi			
	A.	Rendah		
	B.	Menengah Rendah		
	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	50135	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	42914	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	43120	Penyiapan Lahan	NA	Selama pelaku usaha

			menjalankan usahanya
C.	Menengah Tinggi		
52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan sungai dan danau	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan penyeberangan	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50211	Angkutan sungai dan danau linier (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang	7 Hari	5 Tahun
50228	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk barang	7 Hari	5 Tahun
50111	Angkatan laut dalam negeri linier dan tramper untuk penumpang	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50141	Angkatan laut luar negeri untuk barang umum	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49216	Angkutan bus khusus	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49219	Angkutan bus dalam trayek lainnya	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50212	Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang	7 Hari	5 Tahun
50213	Angkutan sungai dan danau untuk Wisata	7 Hari	5 Tahun
50221	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan	7 Hari	5 Tahun
50222	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	7 Hari	5 Tahun
50112	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49421	Angkutan taksi	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	7 Hari	5 Tahun
52215	Aktivitas perpakiran di luar badan jalan (off street parking)	7 Hari	2 Tahun
49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50114	Angkatan laut dalam negeri perintis untuk penumpang	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50131	Angkatan laut dalam negeri untuk barang umum	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50134	Angkatan laut dalam negeri perintis untuk barang	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49423	Angkutan tidak bermotor untuk penumpang	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49212	Angkutan bus perbatasan	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49214	Angkutan bus kota	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49411	Angkutan perbatasan bukan bus, dalam trayek	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49413	Angkutan perkotaan bukan bus, dalam trayek	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
49414	Angkutan perdesaan bukan bus, dalam trayek	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50218	Angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk penumpang	7 Hari	5 Tahun
D.	Tinggi		
49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
42103	Konstruksi jalan rel	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan

			usahnya
--	--	--	---------

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR TRANSPORTASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
2	Peryaratan	Berdasarkan dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; dan 3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB). <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS; 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan iapangan. 4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS; 5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabia disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan 6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar. <p>Izin Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Oflice; 2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS; 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan; 4. DPMPISP bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk malakukan verifikasi

		<p>dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS;</p> <p>5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan</p> <p>6. Pemohon Menerima Dokumen izin.</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)</p> <p>1. Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS;</p> <p>2. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syaratkan;</p> <p>3. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS;</p> <p>4. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait; dan</p> <p>5. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Berdasarkan dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha
7	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksanaan	<p>1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik;</p> <p>2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>3. Mampu mengoperasikan Komputer.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan oleh Tim Audit Intenal</p>
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<p>1. Kotak saran dan pengaduan;</p> <p>2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com;</p> <p>3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121;</p> <p>4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan</p> <p>5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan</p>

		Online.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

7. SEKTOR KESEHATAN

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
7	Urusan/Sektor Kesehatan			
	A.	Rendah		
	B.	Menengah Rendah		
	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	NA	5 Tahun
	47843	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47843	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	56305	Rumah/kedai obat tradisional	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47723	Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47844	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47844	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	32909	Industri Pengolahan Lainnya	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
	47724	Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
	21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	7 Hari	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya

17091	Industri kertas Tissue	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
30231	Industri Sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	7 Hari	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
86902	Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional	Na	5 Tahun
86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	28 Hari	5 Tahun
81290	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	20 Hari	3 Tahun
86105	Aktivitas klinik swasta	20 Hari	5 Tahun
86102	Aktivitas puskesmas	25 Hari	5 Tahun
86104	Aktivitas klinik pemerintah	20 Hari	5 Tahun
86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	10 Hari	5 Tahun
D. Tinggi			
86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	25 Hari	5 Tahun
86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	25 Hari	5 Tahun
86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	28 Hari	5 Tahun
47721	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek	9 Hari	Maksimal 5 Tahun
47722	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotek	9 Hari	Maksimal 5 Tahun
47842	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi	9 Hari	Maksimal 5 Tahun
86103	Aktivitas rumah sakit swasta	28 Hari	5 Tahun

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) SEKTOR KESEHATAN

- 1) Sertifikat Pemenuhan Komitmrnen Produksi Pangan Olahan Industri
- 2) Rumah Tangga (SPP-IRT)
- 3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
- 4) Sertifikat Laik Sehat
- 5) Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitn;9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;10. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan.
2	Peryaratan	Berdasarkan dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Nomor Induk Berusaha (NIB) : <ol style="list-style-type: none">1. Pemohonan meminta informasi di Front Office;2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; dan

	<p>3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohonan meminta informasi di Front Office;2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS;3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS;5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar. <p>Izin Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohonan meminta informasi di Front Office;2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS;3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;4. DPMPISP bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS;5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan6. Pemohon Menerima Dokumen izin. <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS;2. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syatkan;3. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS;4. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait; dan5. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
--	---

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Berdasarkan dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha
7	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan Komputer.
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal.
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua)Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait

		kinerja dan disiplin.
--	--	-----------------------

1. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Izin Platihan Tenaga Kerja

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
8.	Urusan/ Sektor Ketenagakerjaan			
	A.	Rendah		
	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78412	Pelatihan kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78414	Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78415	Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78417	Pelatihan kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

78432	Pelatihan kerja Teknologi Informasi dan Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78435	Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
B.	Menengah Rendah		
C.	Menengah Tinggi		
78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78422	Pelatihan kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78423	Pelatihan kerja Industri kreatif Swasta	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

78424	Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78425	Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portatl	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78101	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
7 1203	Jasa Inspeksi Periodik	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
7 1201	Jasa Sertifikasi	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
7 1202	Jasa Pengujian Laboratorium	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
D.	Tinggi		

	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	7Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
--	-------	--	-------	---

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan tentang Tenaga Kerja Asing. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
2	Peryaratan	Berdasarkan dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KTP, NPWP, Alamat Email, Akta Perusahaan (Non UMK), AHU Perusahaan (Non UMK)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office Membantu Mendaftarkan atau mendampingi pemohon dalam proses pengajuan NIB pada Sistem OSS; dan 3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB). Sertifikat Standar : 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Sertifikat Standar pada Sistem OSS; 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apablia lengkap dilanjutkan dengan peninjauan iapangan; 4. DPMPTSP bersama OPT Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS; 5. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar apabia disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang

		<p>akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan</p> <p>6. Pemohon Menerima Dokumen Sertifikat Standar.</p> <p>Izin Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan Izin pada Sistem OSS; 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem OSS apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan; 4. DPMPISP bersama OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi persetujuan di dalam sistem OSS; 5. Kepala Dinas DPMPISP melakukan persetujuan Penerbitan Izin apabila disetujui izin akan terbit apabila tidak disetujui akan ditolak yang akan disampaikan ke pemohon oleh Sistem OSS; dan 6. Pemohon Menerima Dokumen izin. <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office Menyampaikan persyaratan yang di lampirkan pada Sistem OSS; 2. Pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah di syatkan; 3. Pemohon atau Front Office membantu mengupload semua persyaratan pada Sistem OSS; 4. Pemohon Menunggu verifikasi dari teknis terkait; dan 5. Setelah di verifikasi pemohon dapat mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Berdasarkan dengan pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	NIB Sertifikat Standar Izin Usaha
7	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital

8	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik. 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mampu mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Audit Intemal
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan pengaduan 2. Email ; dpmtsppasamanbarat@gmail.com 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00) 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30) 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR PELAYANAN PUBLIK MELALUI SICANTIK CLOUD

1. Sektor Pertanian

- 1) Izin Tukang Potong Ternak (Verkoning); dan
- 2) Izin Praktek Paramedik Veteriner.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.
2.	Peryaratan	<ul style="list-style-type: none">1. NIB2. Pemenuhan komitmen izin usaha rumah potong hewan berupa pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit :<ul style="list-style-type: none">a. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;b. Pemeriksa daging; danc. juru sembelih halal bagi komoditas yang diperyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).4. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH)5. Surat Rekomendasi teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan6. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL) dari Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Lingkungan
3.	Sistem,	<ul style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk

	Mekanisme dan Prosedur	<p>mendapatkan user dan password pada web sicantik (https://sicantik.go.id)</p> <p>2. Pemohon melakukan login sesuai user pada sicantik (https://sicantik.go.id), Pemohon Melakukan Pengisian Data dan mengunggah dokumen persyaratan.</p> <p>3. Verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Teknis, bisa dilakukan pembuktian visitasi lapangan oleh tim teknis, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan penerbitan persetujuan teknis namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Setelah proses persetujuan Kepala DPMPTSP, izin dapat di cetak oleh back office.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Izin Tukang Potong Ternak Izin Praktek Paramedik Veteriner.
7.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik;</p> <p>2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>3. Mampu mengoperasikan Komputer.</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan</p> <p>2. Dilakukan oleh Tim Audit Intemal.</p>
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<p>1. Kotak saran dan pengaduan;</p> <p>2. Email ; dpmptspasamanbarat@gmail.com;</p> <p>3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121;</p> <p>4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan</p> <p>5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat</p>

		Pengaduan Online.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

- 14. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan**
- 1) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 2) Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy NIB 2. Fotocopy KTP Pemohon 3. Rekomendasi atas UKL-UPL 4. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Pengangkut Limbah B3 5. Siteplan Tempat penyimpanan sementara (TPS LB3)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan user dan password pada web sicantik (https://sicantik.go.id) 2. Pemohon melakukan login sesuai user pada

		<p>sicantik (https://sicantik.go.id), Pemohon Melakukan Pengisian Data dan mengunggah dokumen persyaratan.</p> <p>3. Verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Teknis, bisa dilakukan pembuktian visitasi lapangan oleh tim teknis, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan penerbitan persetujuan teknis namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Setelah proses persetujuan Kepala DPMPTSP, izin dapat di cetak oleh back office.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	<p>1) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>2) Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)</p>
7.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	<p>Ruang Tunggu</p> <p>Tempat Parkir</p> <p>Toilet</p> <p>Help Desk</p> <p>Komputer dan Printer</p> <p>Mesin Scanner</p> <p>CCTV</p> <p>Televisi</p> <p>Mobil Operasional Survey Lapangan</p> <p>Sistem perizinan online</p> <p>Website</p> <p>Internet (wifi)</p> <p>Aplikasi arsip digital</p>
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik;</p> <p>2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>3. Mampu mengoperasikan Komputer.</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan</p> <p>2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal.</p>
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<p>1. Kotak saran dan pengaduan;</p> <p>2. Email ; dpmptspasamanbarat@gmail.com;</p> <p>3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121;</p> <p>4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan</p> <p>5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.</p>

11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

15. Sektor Kesehatan

- 1) Permohonan Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
- 2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
- 3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
- 4) Surat Izin Praktek Perawat Anestesi (SIPPA)
- 5) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
- 6) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
- 7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
- 8) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)
- 9) Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF)
- 10) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- 11) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO)
- 12) Surat Izin Praktek Elektromedik (SIP-E)
- 13) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- 14) Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
- 15) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
- 16) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
- 17) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
- 18) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
- 19) Surat Izin Optical (SIO)
- 20) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
- 21) Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik
- 22) Surat Izin Laboratorium Swasta
- 23) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
- 24) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT)
- 25) Surat Izin Apotik (SIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/ VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
	2. Jenis Izin	3. Peryaratan

	<p>1) Permohonan Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy STR yang diterbitkan dan legalisasi asli oleh KKI (2rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Surat pernyataan memiliki tempat Praktek Mandiri (2 Rangkap) 6. Asli Surat keterangan Aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat kerja (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari puskesmas setempat khusus untuk Praktek Mandiri (2 rangkap) 8. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi IDI/PDGI (2 rangkap) 9. Denah lokasi tempat praktek (2 rangkap) 10. Asli dan foto copy izin praktek yang lama bagi yang perpanjangan (2rangkap) 11. Pas foto warna latar merah jas dokter ukuran 3x4 sebanyak 7 Lembar 12. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)
	<p>2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)</p> <p>3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktek Pakai Materai 6000 (2 rangkap) 6. Asli Surat Keterangan Aktif dari Sarana Pelayanan Kesehatan Tempat Bekerja (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat Khusus untuk Praktek Pribadi (2 rangkap) 8. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/IBI (2 rangkap) 9. Denah lokasi tempat Kerja dan tempat Praktek (2 rangkap) 10. Pas foto warna latar biru pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar 11. Asli dan Foto Copy Izin Praktek yg lama bagi perpanjangan

		<p>12. Foto Copy Pengalaman Kerja untuk pengelolaan Praktek Mandiri (2 rangkap)</p> <p>13. Foto Copy NPWP (2 rangkap)</p>
	4) Surat Izin Praktek Perawat Anestesi (SIPPA)	<p>1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap)</p> <p>2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)</p> <p>3. Foto copy KTP (2 rangkap)</p> <p>4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap)</p> <p>5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana kesehatan tempat bekerja (2 rangkap)</p> <p>6. Asli Rekomendasi dari puskesmas setempat (2 rangkap)</p> <p>7. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi (2 rangkap)</p> <p>8. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap)</p> <p>9. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap)</p> <p>10. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar</p> <p>11. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)</p>
	5) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	<p>1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap)</p> <p>2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)</p> <p>3. Foto copy KTP (2 rangkap)</p> <p>4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap)</p> <p>5. Asli Surat Keterangan Aktif dari Fasilitas Pelayanan kesehatan tempat bekerja (2 rangkap)</p> <p>6. Asli Rekomendasi dari puskesmas setempat (2 rangkap)</p> <p>7. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/PATELKI (2 rangkap)</p> <p>8. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap)</p> <p>9. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap)</p> <p>10. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar</p> <p>11. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)</p>
	6) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	<p>1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap)</p> <p>2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)</p> <p>3. Foto copy KTP (2 rangkap)</p> <p>4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap)</p> <p>5. Surat pernyataan memiliki tempat praktek khusus untuk Izin Praktek Mandiri (2 rangkap)</p>

		6. Asli Surat Keterangan Aktif dari Fasilitas Pelayanan kesehatan tempat bekerja (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari puskesmas setempat khusus untuk Izin Praktek Mandiri (2 rangkap) 8. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/PPNI (2 rangkap) 9. Denah lokasi tempat kerja dan tempat praktek (2 rangkap) 10. Surat Pengalaman Kerja khusus untuk Izin Praktek Mandiri (2 rangkap) 11. Asli dan foto copy izin Praktek yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 12. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar 13. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)
	7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	1. Foto copy STRA yang diterbitkan dan legalisasi asli oleh KFN (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas(2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Asli Surat keterangan Aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat kerja (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/IAI (2 rangkap) 8. Denah lokasi tempat praktek (2 rangkap) 9. Asli dan foto copy izin praktek yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 10. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar 11. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)
	8) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)	1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana kesehatan tempat bekerja (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/PERSAGI (2 rangkap) 7. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap) 8. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 9. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

		10. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)
	9) Surat Izin Praktek Fisioterafis (SIPF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana kesehatan tempat bekerja (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari Puskesmas Setempat untuk Izin Praktek Mandiri (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/IFI (2 rangkap) 8. Denah lokasi tempat Kerja dan Tempat Praktek (2 rangkap) 9. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 10. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar 11. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)
	10) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy STRTTK Legalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Asli Surat keterangan Aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat kerja (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari Organisasi profesi/PAFI (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap) 8. Denah lokasi tempat kerja (2 rangkap) 9. Asli dan foto copy Izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 10. Pas foto warna latar hijau pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar 11. Foto Copy NPWP (2Rangkap)
	11) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy STR dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Asli Surat keterangan Aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat kerja (2 rangkap)

		6. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi IROPIN (2 Rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap) 8. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap) 9. Asli dan foto copy izin kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 10. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar 11. NPWP (2 rangkap)
	12) Surat Izin Praktek Elektromedik (SIP-E)	1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana kesehatan tempat bekerja (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi (2 rangkap) 7. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap) 8. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 9. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar
	13) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	1. Surat pengunduran diri Tenaga Teknis Kefarmasian yang ditanda tangani oleh pemilik sarana pelayanan kefarmasian; 2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai 10.000 dari pemohon yang menyatakan tidak berpraktek disarana tersebut ; 3. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) asli yang akan dicabut; 4. Fotocopy STRTTK; 5. Fotocopy KTP
	14) Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)	1. Foto copy STR yang diterbitkan dan legalisasi asli oleh KKI (2rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Surat pernyataan memiliki tempat Praktek Mandiri (2 Rangkap) 6. Asli Surat keterangan Aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat kerja (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari puskesmas setempat khusus untuk Praktek

		<p>Mandiri (2 rangkap)</p> <p>8. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi IDI/PDGI (2 rangkap)</p> <p>9. Denah lokasi tempat praktek (2 rangkap)</p> <p>10. Asli dan foto copy izin praktek yang lama bagi yang perpanjangan (2rangkap)</p> <p>11. Pas foto warna latar merah jas dokter ukuran 3x4 sebanyak 7 Lembar</p> <p>12. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)</p>
	15) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	<p>1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap)</p> <p>2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)</p> <p>3. Foto copy KTP (2 rangkap)</p> <p>4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap)</p> <p>5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana kesehatan tempat bekerja (2 rangkap)</p> <p>6. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi (2 rangkap)</p> <p>7. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap)</p> <p>8. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap)</p> <p>9. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar</p> <p>10. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)</p>
	16) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	<p>1. Foto copy SIP/STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap)</p> <p>2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)</p> <p>3. Foto copy KTP (2 rangkap)</p> <p>4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap)</p> <p>5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana kesehatan tempat bekerja (2 rangkap)</p> <p>6. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/HAKLI(2 rangkap)</p> <p>7. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap)</p> <p>8. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap)</p> <p>9. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar</p> <p>10. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)</p>
	17) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	<p>1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap)</p> <p>2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)</p> <p>3. Foto copy KTP (2 rangkap)</p> <p>4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap)</p> <p>5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana</p>

		kesehatan tempat bekerja (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/PERSAGI (2 rangkap) 7. Denah lokasi tempat Kerja (2 rangkap) 8. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 9. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar 10. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)
	18) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	1. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap) 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Asli Surat Keterangan Aktif dari sarana kesehatan tempat bekerja (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari Puskesmas Setempat untuk Izin Praktek Mandiri (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari organisasi profesi/IFI (2 rangkap) 8. Denah lokasi tempat Kerja dan Tempat Praktek (2 rangkap) 9. Asli dan foto copy izin Kerja yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 10. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar 11. Foto Copy NPWP (2 Rangkap)
	19) Surat Izin Optical (SIO)	1. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli (2 rangkap) 2. Foto copy KTP (2 rangkap) 3. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara pemilik dengan Refraksionis Optisien (2 rangkap) 5. Foto Copy SIKRO (2 rangkap) 6. Foto Copy SIUP dan TDP (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap) 8. Denah lokasi Optical dan Ruangan (2 rangkap) 9. Asli dan foto copy izin optikal yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 10. Pas foto warna latar merah ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar 11. Foto Copy Npwp
	20) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	1. Foto Copy STR yang dilegalisir Asli MTKP (2 rangkap) 2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Foto copy KTP (2 rangkap) 4. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 5. Surat Pernyataan dari pimpinan tempat bekerja yang menyatakan masih bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut (2 rangkap) 6. Asli Rekomendasi dari Organisasi Profesi (2 rangkap) 7. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap) 8. Asli dan foto copy Izin Radiografer yg lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 9. Pas foto warna latar merah pakaian dinas ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar
	21) Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pemohon (2 rangkap) 2. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Klinik bagi Perusahaan (2 rangkap) 3. Dokumen UPL dan UKL khusus untuk rawat inap dan SPPL khusus untuk rawat jalan (2 rangkap) 4. Propil Klinik: Struktur Organisasi kepengurusan, Tenaga Kesehatan, Sarana prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan, SOP, Peraturan Internal Klinik, (2 rangkap) 5. Foto Copy Izin Praktek dan Izin Kerja seluruh tenaga kesehatan yg bekerja di klinik (2 rangkap) 6. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama dengan dokter Penanggung Jawab (2 rangkap) 7. Bukti hak kepemilikan tanah, bangunan atau surat kontrak minimal 5 tahun (rangkap 2) 8. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap) 9. Denah lokasi Klinik dan Ruangan (2 rangkap) 10. Asli izin klinik yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 11. Pas foto warna latar merah ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar 12. Foto Copy NIB 13. Foto Copy Bpjs Ketenagakerjaan Karyawan
	22) Surat Izin Laboratorium Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pemohon (2 rangkap) 2. Foto copy Pendirian Badan Usaha Laboratorium bagi Perusahaan (2 rangkap) 3. Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dari Lingkungan Hidup (2 rangkap) 4. Propil Laboratorium/Struktur

		<p>Organisasi kepengurusan, Data ketenagaan, Data Sarana prasarana, dan peralatan (2 rangkap)</p> <p>5. Foto Copy Surat Izin Praktek/Izin Kerja seluruh tenaga Laboratorium yg bekerja (2 rangkap)</p> <p>6. Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara pemilik dengan dokter Penanggung Jawab (2 rangkap)</p> <p>7. Surat Pernyataan Kesanggupan Tenaga Teknis/Administrasi (2 rangkap)</p> <p>8. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap)</p> <p>9. Denah lokasi Laboratorium dan Ruangan (2 rangkap)</p> <p>10. Asli izin laboratorium yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap)</p> <p>11. Pas foto warna latar merah ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar</p>
	23) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	<p>1. Foto copy KTP yang masih berlaku</p> <p>2. Foto copy Ijazah terakhir</p> <p>3. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar</p> <p>4. Foto copy Sertifikat penyehat tradisional</p> <p>5. Asli Surat keterangan berbadan sehat</p> <p>6. Asli Rekomendasi dari Asosiasi / profesi bidang penyehat tradisional</p> <p>7. Asli Rekomendasi dari puskesmas setempat</p> <p>8. Denah Lokasi tempat Praktik</p> <p>9. Foto Copy Npwp</p>
	24) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT)	<p>1. Foto copy KTP Pemohon (2 rangkap)</p> <p>2. Foto Copy Ijazah Terakhir (2 rangkap)</p> <p>3. Foto Copy Sertifikat PP-IRT dari Dinas Kesehatan (2 rangkap)</p> <p>4. Asli Surat Berbadan Sehat Dari Dokter bagi Pemilik dan seluruh Karyawan (2 rangkap)</p> <p>5. Asli Rekomendasi Dari Puskesmas setempat (2 rangkap)</p> <p>6. Foto Copy NIB dan Izin Usaha (2 rangkap)</p> <p>7. Denah Lokasi Industri Rumah Tangga (2 rangkap)</p> <p>8. Daftar Peralatan Pengolahan Makanan dan Bahan yang Digunakan (2 rangkap)</p> <p>9. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar</p>
	25) Surat Izin Apotik (SIA)	<p>1. Foto copy Ijazah yang dilegalisir Asli Akademik/Fakultas (2 rangkap)</p> <p>2. Foto copy KTP (2 rangkap)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Asli Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (2 rangkap) 4. Foto copy Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama dengan Dokter penanggung jawab Labor(2 rangkap) 5. Foto Copy SIPA (2 rangkap) 6. Foto Copy SIPTTK (2 rangkap) 7. Foto Copy NIB Badan Hukum (2 rangkap) 8. Asli Rekomendasi dari Puskesmas setempat (2 rangkap) 9. Denah lokasi Labor dan Ruangan (2 rangkap) 10. Daftar terperinci perlengkapan sarana Labor (2 rangkap) 11. Foto copy Dokumen UPL dan UKL (2 rangkap) 12. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu (Pakai Materai) 13. Berita acara serah terima peralihan tanggung jawab 14. Contoh faktur permintaan reagen, dll (2 rangkap) 15. Asli dan foto copy izin Labor yang lama bagi perpanjangan (2 rangkap) 16. Pas foto warna latar merah ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan user dan password pada web sicantik (https://sicantik.go.id) 2. Pemohon melakukan login sesuai user pada sicantik (https://sicantik.go.id), Pemohon Melakukan Pengisian Data dan mengunggah dokumen persyaratan. 3. Verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Teknis, bisa dilakukan pembuktian visitasi lapangan oleh tim teknis, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan penerbitan persetujuan teknis namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon; 4. Apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP; 5. Setelah proses persetujuan Kepala DPMPTSP, izin dapat di cetak oleh back office.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari
6.	Biaya/Tarif	-

7.	Produk Pelayanan	1) Izin Praktek Perorangan Dokter Umum; 2) Izin Praktek Perorangan Dokter gigi; 3) Izin Praktek Perorangan dokter spesielis;
8.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan Komputer.
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Dilakukan oleh Tim Audit Intemal.
11.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptspasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
12.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
13.	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

4. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Izin Operasional SMP Swasta;
- 2) Izin Operasional SD Swasta;

- 3) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- 4) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- 5) Izin Operasional Kursus;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai perizinan pendidikan.
	2. Jenis Izin	3. Peryaratan
	1) Izin Operasional SMP Swasta; 2) Izin Operasional SD Swasta; 3) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan	1. NIB (Nomor Induk Berusaha) 2. Foto copy KTP Kepala Sekolah 3. Foto copy NPWP 4. SK Penunjukan Kepala Sekolah 5. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha 6. Study kelayakan dalam bentuk proposal (kajian kebutuhan pelayanan, sarana, kemampuan pembiayaan, susunan pengurus, daftar tenaga pengajar, NPWP, Program sekolah). 7. Bukti hak kepemilikan tanah, bangunan atau surat kontrak. 8. Denah lokasi, ruangan, sarana dan prasarana.

	<p>4) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</p> <p>5) Izin Operasional Kursus;</p>	<p>1. NIB (Nomor Induk Berusaha)</p> <p>2. Foto copy KTP Penanggung Jawab</p> <p>3. Foto copy NPWP Penanggung Jawab</p> <p>4. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha (jika berbadan usaha/yayasan)</p> <p>9. Study kelayakan dalam bentuk proposal (kajian kebutuhan pelayanan, sarana, kemampuan pembiayaan, susunan pengurus, daftar tenaga pengajar, NPWP, Program Pendidikan).</p> <p>5. Bukti hak kepemilikan tanah, bangunan atau surat kontrak.</p> <p>6. Denah lokasi, ruangan, sarana dan prasarana.</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan user dan password pada web sicantik (https://sicantik.go.id)</p> <p>2. Pemohon melakukan login sesuai user pada sicantik (https://sicantik.go.id), Pemohon Melakukan Pengisian Data dan mengunggah dokumen persyaratan.</p> <p>3. Verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Teknis, bisa dilakukan pembuktian visitasi lapangan oleh tim teknis, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan penerbitan persetujuan teknis namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Setelah proses persetujuan Kepala DPMPTSP, izin dapat di cetak oleh back office.</p>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
7.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	<p>Ruang Tunggu</p> <p>Tempat Parkir</p> <p>Toilet</p> <p>Help Desk</p> <p>Komputer dan Printer</p> <p>Mesin Scanner</p> <p>CCTV</p> <p>Televisi</p> <p>Mobil Operasional Survey Lapangan</p> <p>Sistem perizinan online</p> <p>Website</p> <p>Internet (wifi)</p>

		Aplikasi arsip digital
8.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan Komputer.
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Dilakukan oleh Tim Audit Intemal.
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

15. Sektor Periklanan

1) Izin Reklame

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2011 Kabupaten Pasaman Barat, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha); 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Surat Perjanjian Sewa Lokasi; 4. Gambar/Teks Reklame; 5. Gambar Kontruksi; 6. Denah Lokasi Pemasangan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan user dan password pada web sicantik (https://sicantik.go.id) 2. Pemohon melakukan login sesuai user pada sicantik (https://sicantik.go.id), Pemohon Melakukan Pengisian Data dan mengunggah dokumen persyaratan. 3. Verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Teknis, bisa dilakukan pembuktian visitasi lapangan oleh tim teknis, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan penerbitan persetujuan teknis namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon; 4. Apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP; 5. Setelah proses persetujuan Kepala DPMPTSP, izin dapat di cetak oleh back office.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari
5.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) NIB 2) Izin Reklame
7.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang Tunggu Tempat Parkir Toilet Help Desk Komputer dan Printer Mesin Scanner CCTV Televisi Mobil Operasional Survey Lapangan Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan Komputer.

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal.
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK MENGGUNAKAN APLIKASI TEKNIS
TERINTEGRASI / SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN
GEDUNG (SIMBG)**

- A. Sektor Pekerjaan umum dan perumahan real eastat**
1) Izin PBG; dan
2) Izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 34 / 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 28 / 2002 tentang Bangunan Gedung. 3. PP Nomor 36 / 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 4. PP Nomor16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 5. Peraturan ini adalah kelanjutan dari Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b tentang Undang-Undang Nomor 11 / 2020 tentang Cipta Kerja.
2.	Peryaratan	1. Asli Keterangan Rencana Kota /KRK; 2. KTP dan NPWP Pemohon; 3. Jika Badan Hukum (AKTA SK, NPWP Badan, NIB); 4. Bukti Kepemilikan tanah (Sertifikat Tanah, AJB, Bukti Bayar PBB tahun Terakhir); 5. Gambar Rencana Aksitektur/bangunan; 6. Rencana dan perhitungan struktur bangunan gedung; 7. Foto copy IPTB penanggung jawab perencana arsitektur,struktur/konstruksi termasuk geoteknik, mekanikal dan elektrikl Bangunan Gedung bagi yang dipersyaratkan dengan masa berlaku paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum dinyatakan habis; 8. Asli surat pernyataan persetujuan warga sekitar untuk Bangunan Gedung dengan kegiatan diizinkan bersyarat dan kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat; 9. Foto copy IMB lama beserta gambar lampirannya dan/atau perizinan bangunan

		<p>yang telah dimiliki untuk permohonan IMB perubahan dan/atau penambahan; dan</p> <p>10. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan meminta informasi di Front Office; 2. Front Office melakukan pendampingan kepada pemohon dalam proses pengajuan PBG pada Sistem SIMBG; 3. OPD Teknis memeriksa persyaratan dari pemohon di Sistem SIMBG apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon, apabila lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan; 4. OPD Teknis menghitung retribusi dan di entrikan melalui sistem PBG; 5. Pemohon meminta bukti setoran retribusi ke DPMPTSP untuk di bayarkan ke Bank; 6. DPMPTSP membuat bukti setoran retribusi dan surat penetapan retribusi daerah (SKRD); 7. DPMPTSP memverifikasi bukti pembayaran retribusi; 8. DPMPTSP menerbitkan PBG; dan 9. Pemohon Menerima PBG.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Paling lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunan. Proses yang dilakukan dalam 28 hari tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan; 2. Pemeriksaan Rencana Teknis; 3. Perhitungan Retribusi; dan 4. Penerbitan PBG.
5.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
6.	Produk Pelayanan	<p>PBG</p> <p>SLF</p>
7.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	<p>Ruang Tunggu</p> <p>Tempat Parkir</p> <p>Toilet</p> <p>Help Desk</p> <p>Komputer dan Printer</p> <p>Mesin Scanner</p> <p>CCTV</p> <p>Televisi</p> <p>Mobil Operasional Survey Lapangan</p> <p>Sistem perizinan online</p> <p>Website</p> <p>Internet (wifi)</p> <p>Aplikasi arsip digital</p>

8.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik; 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan Komputer.
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Dilakukan oleh Tim Audit Intenal.
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Pasaman Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HENDRA PUTRA

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekretaris Daerah		
Kepala DPMPTSP		
Sekretaris PMPTSP		

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR